TEORI TEORI YANG MEMBERIKAN DASAR HUKUM BAGI

KEKUASAAN NEGARA

FANI NOVITA

faninovita004@gmail.com

2010003600270

UNIVERSITAS EKA SAKTI

A. PENDAHULUAN

Ada keterkaitan secara konseptual antara kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan kekuasaan. Secara umum kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Pengaruh yang terkait dengan negara, dari atau ditujukan kepada negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan kekuasaan itu bisa dipaksakan secara fisik (koersif) merupakan karakteristik kekuasaan politik. Kekuasaan politik berkait dengan kehidupan bersama atau sosial atau ada dalam konteks sosial maka kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial. Atau kekuasaan dalam arti khusus (species).

Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan, tetapi merupakan kekuasaan yang memiliki legitimasi. Tidak semua kekuasaan memiliki legitimasi, baik legitimasi prosedural maupun hasil atau akibat. Kemudian, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, yang menurut Jean Bodin memiliki karakteristik: tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Namun, menurut Grotius kedaulatan itu dapat dibagi atau dilakukan bersama-sama antara rakyat dengan pimpinannya.

Adapun sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada dua aliran, yakni teori teokrasi dan teori hukum alam. Menurut teori teokrasi sumber kekuasaan adalah dari Tuhan. Penganut aliran atau paham ini, antara lain Agustinus dan Thomas Aquinas. Sedangkan menurut teori hukum alam sumber kekuasaan adalah berasal dari rakyat yang diserahkan kepada penguasa atau raja melalui perjanjian sosial. Pelopornya adalah Rousseau dan Thomas Hobbes.

Kemudian, tentang penjelasan mengenai pemegang kedaulatan paling tidak dikenal ada empat teori, yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan Rakyat, dan teori kedaulatan Hukum.

B. PEMBAHASAN

Banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang teori-teori yang menjadi dasar bagi kekuasaan negara. Teori-teori tersebut muncul berdasarkan keadaan dan kondisi negara saat para ahli tersebut hidup, yang disampaikannya karena adanya rasa ketidakpuasan atas kondisi negara saat itu.

Teori-teori yang memberi dasar hukum bagi kekuasaan negara dalam garis besarnya dapat dibagi atas tiga kelompok besar, yaitu :

1. Teori Teokrasi (Theocratische Theorie).

Teori Teokrasi dibagi atas dua bagian, yaitu :

Teori Teokrasi Langsung. Istilah langsung menunjukkan bahwa yang

berkuasa di dalam negara itu adalah langsung Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan. Persoalan ini sebenarnya berpusat pada kepercayaan rakyat terhadap rajanya yang disebut sebagai Tuhan. Rakyat lain yang tidak berkeyakinan seperti itu, tentu akan memberi penilaian yang lain pula terhadap raja yang dianggapnya sebagai Tuhan.

Teori Teokrasi Tidak Langsung. Menurut penganut teori, bukan Tuhan sendiri yang memerintah suatu negara, melainkan seorang Raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia.

2. Teori Kekuasaan (Machtattheorie).

Teori Kekuasaan dibagi atas dua bagian :

a. Kekuasaan Jasmaniah (Fisik). Tokoh dari ajaran ini adalah Thomas Hobbes dan Machiavelli.

Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia membedakan dua macam status manusia yaitu : 1. status naturalis, kedudukan manusia waktu masih belum ada negara. Dalam status naturalis, negara masih belum terbentuk, masyarakatnya masih kacau. Dalam keadaan ini perselisihan mudah timbul karena sifat manusia dalam keadaan tidak tertib itu merupakan srigala bagi yang lain (Homo Homini Lupus), kalau keadaan ini dibiarkan terus menerus akan timbul perang semesta (Bellum Omnium Contra Omnes). Jadi syarat yang penting menurut Thomas Hobbes menjadi seorang raja adalah orang yang kuat fisiknya, yang melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. 2. status civilis, yaitu kedudukan manusia setelah ada negara sebagai warga negara.

Machiavelli, dalam bukunya yang berjudul Il Principe, ia mengajarkan kepada raja-raja bagaimana cara untuk memerintah sebaik-baiknya. Menurut Machiavelli, seorang raja harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yang dihadapi negara, ia dapat menggunakan segala alat untuk

menguntungkan.

b. Teori Kekuasaan Ekonomi.

Tokoh dari teori ini adalah Karl Marx. Marx menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi golongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Sebagai dasar dari ajaran Marx adalah pertentangan kelas dalam masyarakat dalam dua kelas, yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaum yang ekonomi lemah. Pertentangan antara dua kelas itu ditujukan untuk merebut kekuasaan negara sebab negara adalah alat kekuasaan. Yang penting dalam teori kekuasaan ekonomi dari Karl Marx adalah sandarannya yang disebut historische materialisme yaitu bahwa sejarah kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kebendaan. Marx membedakan dua macam bangunan masyarakat, yaitu :

Bangunan bawah yang didasarkan atas kebendaan.

Bangunan atas yang didasarkan atas kemanusiaan.

3. Teori Yuridis (Juridische Theorie).

Teori ini dibagi dalam 3 golongan yaitu :

a. Teori Patriarchaal.

Teori patriarchaal ini berdasarkan hukum keluarga jaman dahulu, ketika masyarakat masih sangat sederhana dan pada waktu negara belum ada, maka masyarakat hidup dalam kesatuan-kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Seorang kepala keluarga merupakan primus interparis, artinya seorang yang pertama di antara yang sama, karena sifat-sifatnya yang lebih itu, maka ia menjadi orang yang dipuja-puja.

b. Teori Patriamonal.

Patriamonal berasal dari istilah patrimonium yang artinya adalah hak milik.

Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya.

c. Teori Perjanjian.

Teori Perjanjian ini dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu :

Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes manusia itu selalu hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu raja tidak diikutsertakan. Jadi perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat, dimana individu-individu menyerahkan haknya (hak-hak dasarnya) kepada suatu kolektivitas yaitu suatu kesatuan dari individu-individu yang diperolehnya melalui *pactum uniones*, maka di sini kolektivitas itu menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja dalam *pactum subjectiones* tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada di luar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya. Sistem negara seperti ini disebut Monarchie Absolut.

John Locke. Berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian dan karena perjanjian itu raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Akibat adanya perjanjian antara rakyat dengan raja maka timbul Monarchi Constitutional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Dalam perjanjian masyarakat tersebut terdapat dua macam *pactum* yang disebut sebagai : 1. *pactum uniones*, yaitu perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan antara individu-individu, dan 2. *pactum subjectiones*, yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja.

Jean Jacques Rousseau. Paham Rousseau adalah kebalikan daripada Hobbes. Ajaran Rousseau adalah kedaulatan rakyat dan rakyat tidak pernah menyerahkan kepada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah, raja itu hanya sebagai mandataris dari rakyat.

Jadi teori-teori itu hendak membenarkan adanya kekuasaan negara, oleh karena itu kepustakaan teori-teori ini sekaligus dibicarakan bersama-sama dengan arti negara dan tujuan negara. Untuk membenarkan adanya kekuasaan negara biasanya dicari ajaran-ajaran mengenai arti daripada negara dan kemudian dihubungkan dengan tujuannya.

C. PENUTUP

Teori-teori yang memberi dasar hukum bagi kekuasaan negara dalam garis besarnya dapat dibagi atas tiga kelompok besar. Ketiga konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan kekuasaan. Secara umum kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Pengaruh yang terkait dengan negara, dari atau ditujukan kepada negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan kekuasaan itu bisa dipaksakan secara fisik (koersif) merupakan karakteristik kekuasaan politik. Kekuasaan politik berkaitan dengan kehidupan bersama atau sosial atau ada dalam konteks sosial maka kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan

Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, Jurnal Republica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17,

No Nomor, 2020.

Laensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi danLaensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.